



STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARAWANG DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Marsaulina Siahaan, Lukmanul Hakim, Rudyk Nababan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Kabupaten Karawang,

Abstrak

UMKM merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian daerah maupun nasional. Diperlukan strategi-strategi khusus dalam mengangkat sektor UMKM daerah. Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Karawang sebagai pelaksana pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang menerapkan beberapa sasaran strategi guna melaksanakan pengembangan UMKM Karawang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan subjek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Karawang telah melaksanakan beberapa program strategi, seperti promosi produk, strategi pemberdayaan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Program ini dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang. Dengan demikian strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang berdampak pada naiknya pendapatan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi peserta pelatihan serta membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan pelatihan dan modal pengembangan usaha.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Koperasi dan UKM, Pengembangan UMKM.

PENDAHULUAN

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, UMKM mampu memberikan lapangan pekerjaan tanpa memerlukan kualifikasi yang sulit, hanya dibutuhkan sedikit kemauan dan kreatifitas, maka sebuah usaha dapat dimulai. Namun memasuki tahun 2020, Perekonomian Indonesia mengalami tantangan berat. Covid-19 menjadi salah satu tantangan yang dihadapi disegala sektor pengembangan di Indonesia, tak terkecuali sektor UMKM. UMKM sudah menjadi salah satu sektor fundamental dalam perekonomian Indonesia. Setelah adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Kebijakan pembatasan sosial menjadi faktor terpuruknya UMKM. Data BPS menyebutkan per September 2020 bahwa ada ada 45% UMKM yang bertahan selama 3 bulan saja selama pandemi Covid-19. (Arianto, 2020).

Apabila menelaah lebih dalam lagi, sektor UMKM dapat dikatakan mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 telah membuktikan sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang tidak runtuh. Karena pada saat itu sektor UMKM tidak banyak berkaitan dengan sektor-sektor krusial seperti sektor Keuangan domestik maupun global. (PRATIWI, 2020).

Keberhasilan yang ditunjukkan UKM dengan tetap bertahan saat krisis tersebut terjadi, sektor inipun kian lama semakin banyak menarik perhatian berbagai pihak termasuk pemerintah. Pemerintah sadar bahwa sektor industri domestik mampu menjadi jawaban untuk memulihkan perekonomian. Perhatian ini ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan dukungan dengan peningkatan kesempatan, kemampuan dan perlindungan terhadap UKM, dengan

rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Departemen Koperasi dan UKM, 2013). Perlu ada perhatian lebih dalam melakukan upaya pengembangan UMKM baik dari Pemerintah, maupun para pelaku usaha agar dapat mengembangkan sektor UMKM secara lebih kompetitif. Kebijakan pemerintah perlu diupayakan agar lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. fasilitator melalui berbagai kegiatan fasilitasi yang meliputi pelatihan manajemen usaha dan proses produksi (Yusnita & Wibawa, 2020)

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, penulis menemukan bahwa pengembangan UMKM dimulai pada tahun 2011 sampai 2016 memang mengalami peningkatan hasil kinerja namun keberhasilan ini tidak dapat diraih secara optimal karena ditemukannya beberapa masalah yang menjadi poin utama penghambat bagi pelaku UMKM diantaranya (1) kualitas SDM yang rendah, permasalahan ini sering kali diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang minim serta kurangnya akses informasi, inilah yang menjadikan pola bisnis UMKM di Kabupaten Karawang tidak berfokus pada permintaan pasar tetapi produksi; (2) kurang optimalnya peran sistem pendukung kelembagaan, seperti penyedia/pemasok bahan baku produksi, lembaga pembiayaan, layanan bisnis dan lain-lain; (3) kurang efektifnya peraturan dan kebijakan yang ada guna mengatasi permasalahan UKM.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk mencapai ±2.361.019 jiwa pada tahun 2020. Dengan komposisi penduduk usia produktif antara 15-64

tahun berjumlah 1.927.2372 jiwa atau sebesar 68.4%, sebagaimana uraian pada tabel berikut.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Struktur Usia Tahun 2020

| No. | Struktur Usia | Tahun 2020 |
|-----|---|----------------|
| | | Jumlah (orang) |
| 1 | 5-9 | 200.047 |
| 2 | 10-14 | 198.904 |
| 3 | 15-64 | 1.927.232 |
| 4 | Angka beban ketergantungan (dependency ratio %) | |

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa struktur usia 15-64 yang merupakan usia produktif bahwa permintaan tenaga kerja semakin bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan meningkatnya usia produktif yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 berdasarkan sumber dari Badan pusat statistik daerah kabupaten Karawang berjumlah 930.590 orang. Dari jumlah tersebut sebesar 18,15% bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan, pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi sebesar 287.985 orang atau sebesar 30.95%. sedangkan lapangan usaha industri menyerap tenaga kerja sebesar 205.759 orang atau sebesar 22.11% artinya, penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan menjadi salah satu strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran ketika sektor industri dan sektor-sektor perekonomian melemah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015, dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dijelaskan bahwa pemerintah melalui dinas akan memberikan fasilitator untuk mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah melalui

pemasaran namun pada kenyataannya fasilitator yang lebih dibutuhkan oleh keadaan pelaku usaha saat ini adalah lebih kepada pengembangan kualitas ; (4) masih lemahnya daya saing UMKM akibat dari teknik produksi yang cenderung manual misalnya, produk usaha karang taruna pasir jengkol yaitu sandal jepit yang terbuat dari limbah spons; dan (5) kurangnya kemampuan untuk pemasaran dan promosi yang terbatas.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan mengenai Inovasi dan Kreatifitas UMKM di masa pandemi (studi kasus di Kabupaten Bekasi) (Munthe & Rahadi, 2021) menyatakan bahwa menjaga agar konsumen tidak bosan dan tetap setia menggunakan produk yang ditawarkan, maka diperlukan suatu inovasi dalam mengembangkan produk tersebut. Pola yang terbentuk akan menjadi pola dalam kewirausahaan yang besar. Jaringan yang terbentuk juga dapat berdampak pada kegiatan globalisasi perekonomian.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah pada sektor UMKM meliputi Pelatihan, Bantuan pemasaran promosi Mengembangkan sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala atau penghambat sulitnya UMKM untuk berkembang. Menurut (Rohmah et al., 2021) menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan pelaku UMKM sulit berkembang antara lain *Pertama*, Sangat bergantung pada mitra dagang mereka. *Kedua*, Bergantung pada konsumen yang datang langsung ketempat-tempat produksi mereka. *Ketiga*, Sumber daya manusia yang rendah. Maka dari itu diperlukan strategi yang disesuaikan dengan keadaan pasar. Salah satunya adalah pengembangan produk UMKM berbasis *E-Commerce*.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Menurut Bondan dan Taylor dalam (Moleong, 2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat menjabarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, penulis menemukan bahwa pengembangan UMKM dimulai pada tahun 2011 sampai 2016 memang mengalami peningkatan hasil kinerja namun keberhasilan ini tidak dapat diraih secara optimal karena ditemukannya beberapa masalah yang menjadi poin utama penghambat bagi pelaku UMKM diantaranya; (1) kualitas SDM yang rendah, permasalahan ini sering kali diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang minim serta kurangnya akses informasi, inilah yang menjadikan pola bisnis UMKM di Kabupaten Karawang tidak berfokus pada permintaan pasar tetapi produksi; (2) kurang optimalnya peran sistem pendukung yang mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, lembaga litbang, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis termasuk ketersediaan infrastruktur dan lain-lain; (3) kurang efektifnya peraturan dan kebijakan yang ada guna mengatasi permasalahan UKM. Berdasarkan data

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha tahun 2019-2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha, Tahun 2019-2020

| Jenis Usaha | Tahun | |
|----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 |
| Usaha Mikro | 14.987 | 16.201 |
| Usaha Kecil | 60.422 | 69.110 |
| Usaha Menengah | 452 | 563 |
| Jumlah | 75.861 | 87.574 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produk usaha yang dimiliki masyarakat Kabupaten Karawang yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didominasi dengan usaha kecil. Dari ketiga jenis usaha terus mengalami kenaikan yang cukup pesat sepanjang tahun 2019 ke tahun 2020. Tentu kenaikan dalam dua tahun terakhir tersebut dipengaruhi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para pelaku usaha UMKM melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Namun jika dipikirkan lebih jauh apakah setiap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memaksimalkan antusias pelaku usaha sehingga antusias tersebut bukan hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana tersebut tetapi juga dapat berdampak untuk memajukan ekonomi kreatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015, dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dijelaskan bahwa pemerintah melalui dinas akan memberikan fasilitator untuk mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemasaran namun pada kenyataannya fasilitator yang lebih dibutuhkan oleh

keadaan pelaku usaha saat ini adalah lebih kepada pengembangan kualitas ; (4) masih lemahnya daya saing UMKM akibat dari teknik produksi yang cenderung manual misalnya, produk usaha karang taruna pasir jengkol yaitu sandal jepit yang terbuat dari limbah spons ; dan (5) kurangnya kemampuan untuk pemasaran dan promosi yang terbatas



Gambar 1. Dokumentasi dengan Bpk. Agus Jaelani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (Dinkop)

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang berupaya melaksanakan program-program strategis guna menjalankan program pengembangan pada sektor UMKM. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang pada dasarnya merupakan strategi yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi dan UKM. Berikut beberapa upaya strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dalam pengembangan produk lokal daerah Karawang.

Program Promosi

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan produk lokal adalah dengan cara merancang program promosi. Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Karawang sebagai instansi daerah yang mengurus pengembangan program UMKM memfasilitasi sarana untuk para pemilik usaha guna mempromosikan produknya. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan terbuka dan menggali potensi sumber daya lokal.

Memfasilitasi sarana pemasaran menjadi salah satu upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dalam hal meningkatkan produk UMKM Karawang agar dapat mencakup pasar yang lebih luas. Promosi produk lokal Karawang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pameran UMKM. Dengan adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kab. Karawang melalui program-program pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang diharapkan dapat memberi impact positif terdapat para pemilik usaha UMKM agar aktif dan selektif dalam merancang serta menampilkan produk-produknya dengan desain, dan harga yang semakin bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, dan bahkan dari negara-negara lain baik di pasar nasional maupun internasional.

Pelaksanaan Program pemasaran/ promosi UMKM bertujuan untuk:

1. Sebagai wadah untuk para pemilik produk UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Diharapkan dengan adanya fasilitas sarana promosi ini, dapat menyangkut pangsa pasar nasional maupun internasional.
2. Memiliki nilai jual dan potensi besar untuk produk lokal daerah agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia.
3. Menumbuhkan kreatifitas

yang dinamis bagi para pemilik usaha untuk bersaing dengan produk-produk UMKM lainnya.

4. Sebagai forum pemersatu antara para pengusaha, pengrajin ataupun masyarakat agar dapat bertukar wawasan dan pengetahuan seputar produk mereka.

Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang berupa Gebyar Pameran UMKM Karawang yang diselenggarakan pada 14 sampai 29 Juni 2021 dan masih tetap berlanjut untuk memperingati HUT Koperasi Nasional ke 74 pada 12 Juli 2021 dan bekerja sama dengan Tokopedia untuk melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

Selain pelaksanaan Gebyar Pameran, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Karawang juga melaksanakan kegiatan Pameran di Galeri UMKM di Galuh Mas Karawang Pameran ini diselenggarakan setiap hari sejak 2020-sekarang berlokasi di Matahari Galuh Mas Karawang Lt. 4 dan juga di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Sebelumnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang juga memiliki galeri UMKM yang terletak di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.



Gambar 2. Galeri Pusat Oleh-oleh UMKM

Karawang di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Karawang

Fasilitasi berupa Galeri UMKM Karawang diharapkan dapat mengangkat promosi produk UMKM Karawang kepada lingkup pasar yang lebih luas. Selain sebagai wadah promosi untuk produk-produk UMKM, dengan adanya Galeri tersebut, para pelaku UMKM Karawang dapat menjadikan sarana dalam menciptakan produk dengan nilai jual yang kompetitif.

Penyelenggaraan promosi produk UMKM bisa menjadi wadah bagi para pemilik/pengrajin UMKM untuk mengakses pangsa pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang sangat selektif dalam memilih UMKM yang berhak menjadi peserta pameran tersebut. proses penyeleksian produk UMKM bertujuan untuk mencari produk UMKM mana saja yang berhak dan berpotensi untuk dikembangkan lebih besar lagi.

Pelatihan Kewirausahaan

Melaksanakan program pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu upaya penting dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas kewirausahaan/ sumber daya manusia UMKM, selain itu, tujuan diadakannya pelatihan ini agar para pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan manajerial kewirausahaan. Sehingga menciptakan UMKM yang sehat dan mandiri. Akan ada sosialisasi mengenai pelaksanaan pelatihan melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang mengambil peran dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan UMKM. Dinas memfasilitasi setiap program UMKM dengan menjembatani antara pemilik usaha dengan pihak yang dibutuhkan

pemilik usaha tersebut. Sarana dan prasarana diharapkan dapat mendukung perkembangan UMKM tersebut.

Fasilitasi Perizinan Kewirausahaan

Perizinan mendirikan usaha atau legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan produk usaha. Namun sebagian besar para pemilik usaha mikro di Karawang masih banyak yang belum memiliki perizinan/legalitas yang kuat, seperti Ijin Pangan Industri Rumah Tangga dan Halal, sehingga kurang bisa memiliki akses dengan pasar yang lebih luas, pemasaran masih terbatas di lingkungan setempat, kurang percaya diri atas produk yang dihasilkan karena belum adanya pengakuan yang legal dari Pemerintah.



Gambar 3. Dokumentasi bersama Bpk. Ajang selaku Penata Keuangan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikra (Dinkop)

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi dan UKM, mengupayakan dan memfasilitasi perizinan para pemilik usaha yang belum memiliki perizinan/legalitas produk. Anggaran Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Karawang setiap tahun anggaran sampai dengan tahun 2021 digunakan untuk biaya sosialisasi, biaya penerbitan sertifikat Halal dan Sertifikat

Tanah, ditargetkan sebanyak 165 sertifikat Halal dan 165 sertifikat PIRT serta 100 sertifikat tanah setiap tahunnya.

Atas inisiasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang mengoptimalkan pencapaian sasaran program-program yang sudah dirancang dalam Rencana Strategi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka penyelenggaraan promosi produk UMKM menjadi salah satu program prioritas dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang.

Program Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian bantuan alat-alat produksi yang diperlukan untuk para pelaku usaha kecil, dengan harapan produk yang dihasilkan dapat memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih baik. Sehingga dapat bersaing di tingkat pasar yang lebih luas. Dengan segala aspek pendukung dalam pelaksanaan strategi pengembangan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang sebagai pelaksana kebijakan di Daerah Karawang haru mengoptimalkan dana kegiatan yang berasal dari APBD serta Memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM agar pembinaannya merata.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang selaku pelaksana program-program UMKM di Karawang berhak melaksanakan program strategi yang telah disesuaikan dengan kondisi/keadaan di Kabupaten Karawang. Mengoptimalkan program sasaran strategi menjadi kunci tercapainya tujuan dari program pengembangan UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM harus dapat mencari peluang bisnis. Jiwa kewirausahaan haruslah dimiliki oleh setiap pelaku UMKM karena jika seorang pelaku usaha memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, dia akan jeli melihat peluang bisnis serta mengerti cara menyikapi dan mengantisipasi kegagalan.

SIMPULAN

UMKM sudah menjadi salah satu sektor fundamental dalam perekonomian Indonesia. Pengembangan produk lokal daerah merupakan upaya dalam membangun ketahanan perekonomian daerah maupun nasional. Namun pengembangan UMKM mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Merebaknya covid-19 di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan UMKM di Indonesia. Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Karawang sebagai pelaksana program pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang memiliki beberapa strategi dalam pengembangan produk lokal daerah.

Dinas Koperasi dan UKM berhak melaksanakan strategi yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Karawang. Diantaranya melakukan promosi, dengan tujuan guna menggali potensi dan memberi kesempatan dalam mengembangkan produk lokal daerah. Selain promosi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang melaksanakan pelatihan kewirausahaan guna menggali potensi dan membangun SDM yang berkompeten di bidang usaha, Dinas Koperasi juga melakukan strategi dalam memfasilitasi perizinan, sehingga memberi peluang bagi para pemilik UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*.

Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi. Warta KUKMU untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. vol 5no.1,2016.

Munthe, R. T. J., & Rahadi, D. R. (2021). INOVASI DAN KREATIFITAS UMKM DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BEKASI). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan*

Bisnis, 9(1).
<https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.135>

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun : 2015 Nomor : 4).

Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor : 57).

PRATIWI, M. I. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN EKONOMI SEKTOR UMKM. *Jurnal Ners*, 4(2).
<https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Karawang, Tahun 2016-2021.

Rohmah, A. A., Rochim, A. I., & Sunardjanto, B. (2021). Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan UMKM. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2).

Yusnita, M., & Wibawa, D. P. (2020). Menakar Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(1).
<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3020>